BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratannya, oleh karena itu wilayah perairan Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan potensi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa " bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". UUD ini lalu dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 2 ayat 2 tentang wewenang negara dalam menguasai bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa wilayah perairan yang dapat dikatakan berpotensi besar dalam pengembangannya, salah satu wilayah tersebut adalah kawasan Selat Sunda. Selat Sunda merupakan Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dimana kawasan selat sunda masuk ke dalam dua provinsi yang berbeda. Untuk di Pulau Sumatera, sebagian Selat Sunda merupakan wilayah Provinsi Lampung dan sebagian lagi merupakan wilayah Provinsi Banten. Aktivitas di Selat Sunda ini tergolong sangat aktif, selain sebagai jalur penyebrangan kapal antar pulau terdapat pula berbagai aktifitas yang dilakukan di wilayah pesisir nya, seperti pusat ekonomi pedagangan, pariwisata, perindustrian dan kegiatan lainnya. Hal ini menyatakan bahwa pengelolaan di daerah selat sunda ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena kawasan ini pada dasarnya merupakan salahsatu kawasan yang memberikan dampak besar secara nasional baik berupa ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan itu sendiri. Selain hal tersebut, pengelolaan yang tepat guna ini bertujuan agar potensi yang ada di wilayah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pengelolan kawasan Perairan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada kenyataannya, pemanfataan pada kawasan ini sering kali mengabaikan

kondisi dilapangan. Seperti penempatan objek-objek ruang perairan yang terdapat di ruang laut tidak melihat kondisi dibawah lautnya dan tidak memedulikan kepentingan pihak lain yang juga membutuhkan kawasan tersebut, hal ini menyebabkan masih banyaknya konflik-konflik yang terjadi antar lembaga maupun perseorangan dalam artian adanya tumpang tindih baik dari objek ruang perairan, lembaga yang berwenang maupun legalitasnya. Jika kondisi ini tidak segera dibicarakan, nantinya akan terjadi berbagai permasalahan terutama soal pemanfaatan ruang laut di Provinsi Banten.

"Posisi dan potensi perairan Selat Sunda ini sangat strategis. Di satu sisi punya potensi perikanan dengan lokasi kegiatan penangkapan ikan yang baik, di sisi lain ada kawasan industri juga di sananya. Belum lagi potensi bencana alam. Masalah yang kompleks ini bukan hanya berdampak kepada ekosistem laut saja. Tapi lebih jauh, aktivitas yang padat di Selat Sunda jika tidak segera dipetakan tentu akan menggangu kelancaran pelayaran yang nantinya mengganggu perekonomian kita," - Suharyanto, Direktur Perencanaan Ruang Laut pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI.

Selain menjadi salah satu perlintasan internasional kapal antar benua, dari hasil analisa bidang kelautan KPP, setidaknya terdapat sejumlah aktivitas berskala nasional di antaranya 17 obyek strategis nasional di Banten dan 12 obyek strategis nasional di Provinsi Lampung. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukannya sebuah upaya yang nyata untuk para pengambil kebijakan dapat menyelesaikan permasalah-permasalahan yang terjadi. Salahsatu upaya untuk mendapatkan informasi dari pemanfataan pengelolaan ruang perairan tersebut ialah dengan mengklasifikasi objek-objek ruang perairan di wilayah tersebut yang berdasarkan zona ruang laut yang akan dikaji dalam penelitian tugas akhir ini.

Pada penelitian yang akan di laksanakan, data yang digunakan berupa peta batimetri di wilayah selat sunda untuk menentukan kontur kedalaman laut, peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten dan peta Laut kawasan Selat Sunda Pushidrosal sebagai data utama informasi objek eksisting di wilayah penelitian dan literatur untuk menentukan zona ruang laut. Dari ketiga peta tersebut lalu dilakukan pengolahan data, setelah objek eksisting sudah ter-identifikasi dan pembagian zona ruang laut sudah ditentukan,

maka selanjutnya berupa meng-klasifikasi objek-objek ruang perairan eksisting di lokasi penelitian dengan pembagian zona ruang laut, yaitu permukaan laut dan udara diatasnya, kolom air laut, dasar laut dan tanah dibawahnya. Untuk pengolahan dan penyajian data menggunakan bantuan beberapa *software* pemanfaatan dari GIS dan Software penunjang lainnya. Dalam kajian tentang objek-objek ruang laut, tentunya tidak akan lepas dari konsep kadaster kelautan dimana didalam konsep kadaster kelautan tersebut akan berisikan konsep-konsep, subjek dan objek pengelolaan ruang laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian zona ruang laut untuk pemanfataan ruang perairan?
2. Bagaimana klasifikasi objek–objek ruang perairan berdasarkan pembagian zona ruang laut di perairan Provinsi Banten?
3. Bagaimana penentuan lembaga yang berhak dan berwenang atas pemanfaatan ruang perairan di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menentukan pembagian zona ruang laut untuk pemanfaatan ruang perairan
2. Mengklasifikasi objek-objek ruang perairan berdasarkan pembagian zona ruang laut yang berada di perairan Provinsi Banten
3. Menentukan lembaga atau instansi yang memiliki hak dan kewenangan atas pemanfataan ruang perairan di Provinsi Banten

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sebuah informasi pemanfaatan objek-objek ruang laut yang merupakan implementasi dari kadaster kelautan di Indonesia.
2. Sebagai bahan evaluasi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan tentang pemanfataan ruang laut dimasa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada tugas akhir ini adalah :

1. Studi literatur untuk menganalisis pembagian zona ruang laut yaitu permukaan laut dan udara diatasnya, kolom air laut, dasar laut dan tanah dibawahnya.
2. Menentukan pembagian zona ruang laut yaitu permukaan laut, kolom air laut dan dasar laut berdasarkan data bathimetri nasional.
3. Identifikasi dan klasifikasi objek ruang perairan berdasarkan pembagian zona ruang laut studi kasus di daerah selat sunda yang masuk kedalam Provinsi Banten.

1.6 Metodologi

Metodologi yang dilakukan dalam tugas akhir ini, pertama yaitu studi literatur yang berupa tulisan-tulisan ilmiah, penelitian-penelitian yang telah ada khususnya terkait dengan objek-objek ruang laut dan zona ruang laut. Studi literatur ini merupakan bahan pemahaman sebagai dasar dan pertimbangan kita untuk penulisan tugas akhir ini. Kedua, tahap pengumpulan data dan informasi terkait objek-objek ruang laut yang terdapat di wilayah penelitian serta zona-zona ruang laut. Data ini dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Tahap ketiga, hasil dari pengumpulan data dan informasi kemudian akan diolah yang outputnya berupa identifikasi dan klasifikasi objek-objek ruang perairan menurut zona ruang laut yang berguna sebagai sebuah informasi pemanfataan ruang perairan eksisting di wilayah penelitian. Output yang berupa identifikasi dan klasifikasi ini dapat digambarkan kedalam sebuah peta.

Berikut merupakan diagram alir metode yang digunakan dalam penelitian :

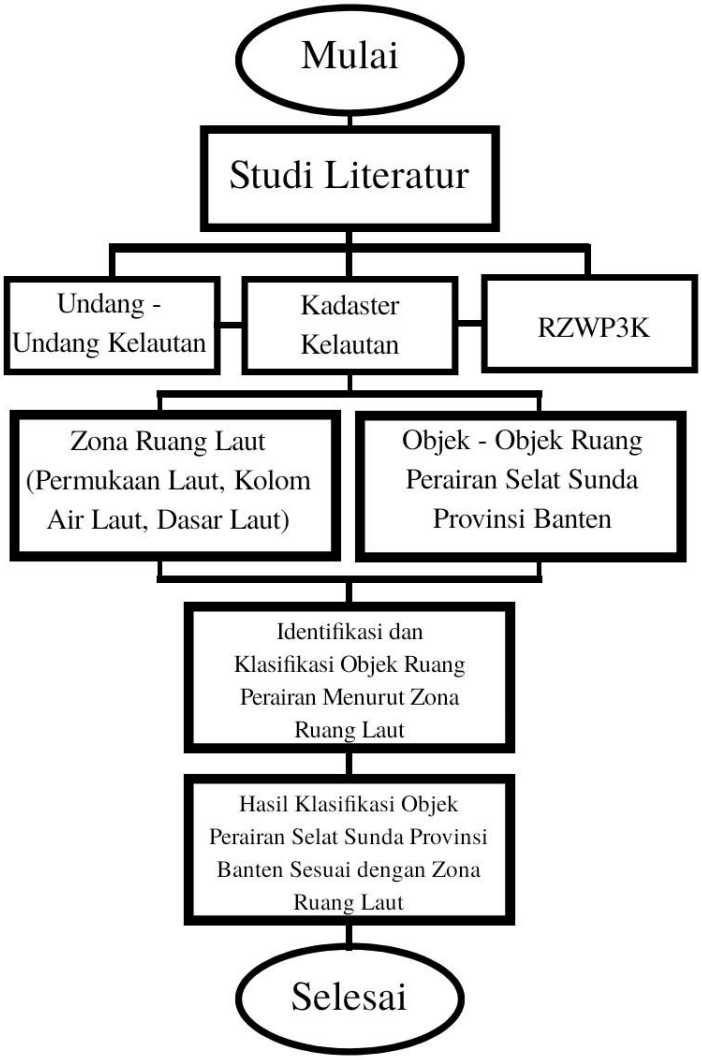

Gambar 1. 1 Diagram Alir Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pokok-pokok pemikiran penulisan tugas akhir ,yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI LITERATUR

Pada bab ini akan membahas mengenai studi literatur tentang konsep pembagian zona kedalaman, objek-objek ruang perairan

yang merupakan implementasi dari kadaster kelautan, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khusunya di daerah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan dari tugas akhir ini mencakup metode pembagian zona kedalaman serta mengidentifikasi dan mengklasifikasi objek ruang perairan pada daerah penelitian yang berguna sebagai sebuah informasi pemanfataan ruang laut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan yang telah didapatkan dari penelitian ini yang berupa klasifikasi dari objek-objek perairan menurut pembagian zona kedalaman.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan objek-objek ruang perairan dan sebagai bahan evaluasi dari pengelolaan objek-objek ruang perairan pada daerah penelitian.